

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN  
DALAM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam perlu menetapkan Organisasi Kelurahan.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan materi muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM  
KOTA PAGAR ALAM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- e. Kepala Kecamatan disebut Camat
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pagar Alam dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- g. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- h. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kelurahan yang berasal dari penggabungan, pemekaran desa - desa dan atau Kelurahan dalam Kota Pagar Alam.

- (2) Nama - nama Desa dan Kelurahan yang dimaksud pada ayat 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini;

### **BAB III**

## **KELURAHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Paragraf 1 Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **Paragraf 2 Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

### **Paragraf 3 Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan dan kemasyarakatan;

- b. Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Melakukan fungsi -- fungsi lain yang dilimpahkan kepada kelurahan;

### **BAB III SUSUN ORGANISASI KELURAHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
  - e. Seksi Pelayanan dan Umum;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Pertama Sekretariat**

#### **Pasal 7**

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Lurah dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

Bagian Ketiga  
Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 11

Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pelaksana kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan camat dibidang pelaksanaan perekonomian dan pembangunan Kelurahan, perekonomian perbankan, pengkreditan rakyat, pengoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan, meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi hasil produksi serta membantu pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan pembinaan pembangunan dan perekonomian masyarakat Kelurahan;
- b. Membantu kegiatan pembinaan perbankan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kebutuhan.
- c. Membantu pelaksanaan peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

- f. Menyiapkan bahan - bahan dalam rangka pembinaan musyawara Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.

### **Bagian Keempat Seksi Pelayanan Umum**

#### **Pasal 13**

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dibidang pelayanan umum.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Membantu pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol dan got. jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal. Halte, lampu penerang jalan, instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu - rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, markas jalan, limba industri, maupun limbah rumah tangga, keindahan dan pertamanan;
- c. Membantu pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya..

#### **Pasal 15**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi kelurahan serta hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

#### **Pasal 16**

Pembentukan organisasi Kelurahan, dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan kewenangan, kemampuan, dan kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan;

### **BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Lurah diangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat;
- (2) Lurah diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pejabat - pejabat lainnya dilingkungan kelurahan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (4) Jenjang Jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku;

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;



Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Disahkan di Pagar Alam  
pada tanggal 14 Agustus 2003

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 21 Agustus 2003

**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

Dto

Drs. A. FACHRI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 091 301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOT 08 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 08 TAHUN 2003  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN  
DALAM KOTA PAGAR ALAM

### SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM



DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS KOTA PAGAR ALAM  
Dito

Di s. A. FACHRI, MM  
Pembinu Utama Muda  
NIP. 010 091 301

DISAHKAN DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM  
Dito

H. DJAZULI KURIS

TABLE 10. Nama-nama (Indonesian) and (English) of the 100 most common rice varieties

No.	Nama Indonesia	Indonesian Name	English Name	Area (ha)	Yield (t/ha)	Planting Area (ha)	Yield (t/ha)	Planting Area (ha)	Yield (t/ha)	Planting Area (ha)
1	Ketupatan Gunung Jember	Gunung Jember	Gunung Jember	23.18	6.67	874	1.41	1.85	1.85	1.85
2	Ketupatan Merangin	Merangin	Merangin	10.28	6.33	1.516	1.40	3.45	3.45	3.45
3	Ketupatan Bojonegara	Bojonegara	Bojonegara	0.6	9.345	1.419	1.14	1.14	1.14	1.14
4	Ketupatan Tegal Gin Indrah	Indrah Gin	Indrah Gin	0.28	3.365	690	1.14	1.14	1.14	1.14
5	Ketupatan Tumbak Ulas	Karang Dapo	Karang Dapo	7.92	18.07	462	1.14	1.14	1.14	1.14
6	Ketupatan Uu Rurah	Beringin Sako	Beringin Sako	11.2	2.255	487	1.14	1.14	1.14	1.14
7	Ketupatan Tanjung Agung	Tanjung Payang	Tanjung Payang	8.6	2.147	463	1.14	1.14	1.14	1.14
8	Ketupatan Beemah Seresan	Cempaka	Cempaka	0.74	7.978	1.565	0.74	0.74	0.74	0.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Kecamatan Pegar Alam Utara	Talang Tinggi										10 Kelurahan
	Kelurahan Dempo Makmur											Penggabungan 1 desa 2 desa
			8,48	2 171	503					1 411	347	198
10	Kelurahan Bangun Rejo	Bangun Rejo										Penggabungan 1 desa 3 Dusun
			11	3 483	1 548					1 814	347	
11	Kelurahan Curuf Jene	Pematang Bango										Penggabungan 1 desa 2 desa
			8	2 061	444					1 923	327	117
12	Kelurahan Kurban Babas	Pagar Gading										Penggabungan 3 desa
			12,05	2 343	465					1 070	214	68
13	Kelurahan Salibar	Pangondonan										Penggabungan 2 desa
			10	2 217	449					1 854	359	183
14	Kelurahan Alun Dus	Palani										Penggabungan 2 desa
			7,4	2 125	438					386	91	347
15	Kelurahan Beringin Jaya (Minus Demporekan + Bluk PU)	Beringin Jaya										1 Kelurahan
			1 240	5 010	930					5 010	930	
16	Kelurahan Pegar Alam	Pegar Alam										1 Desa + sebagian Kelurahan
			760	1 783	374					1 274	254	120
17	Kelurahan Sukorejo	Sukorejo										Penggabungan 1 desa
			1 000	6 450	1 344					6 450	1 344	
18	Kelurahan Bangun Jaya	Kemuning										Penggabungan 2 Kelurahan
			1 770	3 401	728					1 484	344	362
19	Kecamatan Dempo Utara	Gn. Agung Pauh										7 Kelurahan
	Kelurahan Agung Lawangan											Penggabungan 4 desa
			38,75	4 668	1 334					832	240	362
										1 563	208	484
										770	208	
										1 385	484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Kelurahan Bumi Agung	Bumi Agung	12,4	3.149	741	-	-	-	2.764	581	Penggabungan 2 desa
21.	Kelurahan Pagar Wangi	Tegur Wangi Baru (Antara Tegur Wangi baru dengan Pagardini)	17,55	3.078	731	-	-	-	1.279	286	Penggabungan 3 desa
22.	Kelurahan Jangkar mas	Jambat Akar	11,6	2.177	657	-	-	-	763	191	Penggabungan 3 desa
23.	Kelurahan Burung Dhiang	Talang Darat	17,00	2.487	902	-	-	-	1.435	538	Penggabungan 2 desa
24.	Rabeh Tinggi	Gunung Measir (antara Gn Measir dengan Sumpang Sendar angin)	16,73	2.702	600	-	-	-	663	201	Penggabungan 4 desa
25.	Kelurahan Muara Sibin	Muara Sibin	12,8	2.882	882	-	-	-	1.780	446	Penggabungan 3 desa
	Kecamatan Dampo Selatan										
26.	Kelurahan Lubuk Buntak	Lubuk Buntak	38,4	2.507	512	-	-	-	795	127	Penggabungan 3 desa
27.	Kelurahan prahu Dipo	Tanjung Menang	46,5	2.882	559	-	-	-	1.016	244	Penggabungan 4 desa
28.	Kelurahan Perjalang	Tebat Lereh	58,42	2.536	616	-	-	-	809	174	Penggabungan 4 desa
29.	Kelurahan Kancas Dwe	Bandar	66,47	920	528	-	-	-	673	148	Penggabungan 4 desa
30.	Kelurahan Abung Bungsu	Benus Kelling	71,25	3.195	751	-	-	-	209	209	Penggabungan 4 desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Macam-macam Dempo Tengah								
01	Kelurahan Pingang Kendal	Sugiyad	30	2.554	560	Dusun Pingang Kendal Dusun Sugiyad	Desa Pingang Kendal Desa Sugiyad	18 12	1.300 1.254
02	Kelurahan Karang Dalo	Karang Dalo	20	1.750	376	Dusun Karang Dalo Dusun Uluak Pandan Air Dun	Desa Karang Dalo	20	1.750
03	Kelurahan Padang Temu	Kerta Dewa	22	2.670	694	Dusun Pengalangan Dusun Kerta Dewa Dusun Jengg	Desa Pengalangan Desa Kerta Dewa Desa Jengg	9 7 5	1.125 796 756
04	Kelurahan Juch	Juch	43	2.379	63	Dusun Juch Dusun Semidang Atas	Desa Juch Desa Semidang Atas	10 25	1.071 1.308
05	Kelurahan Cand Jaba	Sumber Jaba	32	1.791	523	Dusun Rembe Cand Dusun Sumber Jaba	Desa Rembe Cand Desa Sumber Jaba	5 27	799 1.071

DIGABWAKI DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

Dito.

H. DJAZULI KURIS

DITUNJANGKAN DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS KOTA PAGAR ALAM

Dito

Drs. A. FACHRI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 091 301